

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR



Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikator output sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Semoga penyusunan Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan organisasi lebih lanjut dan kami berharap Dinas Kesehatan semakin nyata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan khususnya untuk peningkatan angka usia harapan hidup dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini kami mengucapkan terimakasih.



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikator output sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Semoga penyusunan Renstra ini dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan organisasi lebih lanjut dan kami berharap Dinas Kesehatan semakin nyata mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan khususnya untuk peningkatan angka usia harapan hidup dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini kami mengucapkan terimakasih.

Malili, September 2025
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Adnan D Kasim
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660502 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan	8
2.2 Permasalahan dan Isu Dinas Kesehatan	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030.....	44
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030	45
3.3 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	51
3.4 Strategi Dinas Kesehatan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	52
3.5 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan.....	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kesehatan	56
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	101
BAB V PENUTUP	104
5.1 Kaidah Pelaksanaan	104
5.2 Pengendalian.....	105
5.3 Evaluasi	106
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN	15
Tabel 2.1.2.1 Distribusi Sumber Daya Manusia	16
Tabel 2.1.2.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Struktural Pegawai.....	17
Tabel 2.1.2.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Fungsional Pegawai.....	17
Tabel 2.1.2.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kesehatan	21
Tabel 2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.1.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.1.3.4 Capaian Suistainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.2.1.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	37
Tabel 2.2.1.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kesehatan	41
Tabel 3.1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2030	47
Tabel 3.1.2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).....	51
Tabel 3.1.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan	53
Tabel 3.1.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan.....	54
Tabel 4.1.1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan	68
Tabel 4.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030.....	87
Tabel 4.1.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	100
Tabel 4.1.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	101
Tabel 4.1.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan	102

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan kesehatan daerah untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan selaras dengan visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu “Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian Kesehatan, serta regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan. Prosesnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up* melalui koordinasi dengan Bapperida dan seluruh pemangku kepentingan.

Secara umum, kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kemajuan positif, ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Namun, masih terdapat tantangan strategis, antara lain: ketimpangan akses pelayanan di wilayah terpencil, keterbatasan tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang perlu ditingkatkan pada beberapa indikator.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan menetapkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan layanan dasar kesehatan, peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan, pemanfaatan data dan digitalisasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui promosi dan pencegahan penyakit.

Selain itu, Renstra ini juga menguraikan tujuan dan sasaran strategis yang berfokus pada (1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan merata, (2) memperkuat sistem kesehatan daerah, termasuk SDM, sarana prasarana, serta pendanaan kesehatan yang efektif dan efisien, (3)

meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan sesuai standar nasional, (4) mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kesehatan yang bersih, akuntabel, dan berbasis digital.

Implementasi strategi ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan prioritas, seperti transformasi layanan primer di seluruh Puskesmas, penguatan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah, dan peningkatan kualitas SDM serta sarana-prasarana kesehatan.

Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM bidang kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka prevalensi stunting, mempercepat eliminasi penyakit menular seperti tuberculosis, demam berdarah dan HIV/ AIDS, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik.

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan kesehatan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing sebagai fondasi utama menuju Luwu Timur yang maju dan sejahtera.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak, sehat, dan sejahtera, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu serta menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang dalam menjalani pola hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif secara sosial dan ekonomis, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan merata. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan program dari periode sebelumnya, serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Renstra Kementerian Kesehatan, dan kondisi aktual permasalahan kesehatan di daerah. Penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, serta pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergis bersama para pemangku kepentingan terkait.

Pembangunan kesehatan dalam dokumen Renstra ini didasarkan pada prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, non-diskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, memperkuat pelayanan kesehatan yang bermutu, mengurangi kesenjangan akses dan mutu layanan, meningkatkan ketahanan sistem kesehatan daerah, serta menjamin kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan produktif. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Visi daerah, yaitu: **“LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA.”**

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur (RPJMD) Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168)
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah untuk menjadi pedoman atau arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah dan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Kementerian Kesehatan, dan kebijakan nasional lainnya.

Berikut ini adalah maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan secara lebih rinci:

1.3.1 Maksud

1. Sebagai acuan strategis dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah di bidang kesehatan.
2. Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam bidang kesehatan.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dalam menyusun rencana kerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan kesehatan daerah untuk jangka menengah.

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya (manusia, dana, sarana-prasarana) dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
3. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan.
4. Menjadi dasar evaluasi kinerja, baik dalam konteks penilaian internal maupun eksternal terhadap capaian pembangunan kesehatan daerah.
5. Mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.
6. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab I paling sedikit memuat, latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD

Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat, (1) Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, (2) Sumber daya Perangkat daerah, (3) Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan (4) Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda kelompok sasaran layanannya adalah perangkat Daerah).

Catatan dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada); Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada); dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada).

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab III paling sedikit memuat, Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029, Strategi perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029;

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab IV paling sedikit memuat, Uraian program, Uraian kegiatan, Uraian, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah) dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan dapat dilihat berikut ini:

1. Dinas Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
3. Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/ kota.
4. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah. Sekretariat dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan Daerah.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan Masyarakat. Bidang kesehatan masyarakat dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko investigasi, dan pengendalian populasi dan/ atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat;

- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan diwilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/ teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/ penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

4. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. fasilitasi tata Kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. pengelolaan audit medis/ audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah

tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/ atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/ atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya.

7. Unit Pelaksana Teknis

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Puskesmas merupakan UPT Dinas Kesehatan, dimana di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 18 Puskesmas yaitu:

1. Puskesmas Burau
2. Puskesmas Wotu
3. Puskesmas Tomoni
4. Puskesmas Tomoni Timur
5. Puskesmas Mangkutana
6. Puskesmas Kalaena
7. Puskesmas Angkona
8. Puskesmas Malili
9. Puskesmas Lampia
10. Puskesmas Wasuponda
11. Puskesmas Wawondula
12. Puskesmas Timampu
13. Puskesmas Bantilang
14. Puskesmas Mahalona
15. Puskesmas Nuha
16. Puskesmas Lakawali
17. Puskemas Parumpanai
18. Puskesmas Bonepute.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

**Gambar 2 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Sumber: Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan maupun administrasi pemerintahan, serta didukung oleh sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

Sumber daya tersebut meliputi tenaga kesehatan di berbagai kategori, seperti tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga farmasi, tenaga laboratorium, serta tenaga penunjang kesehatan lainnya. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur, meliputi puskesmas, pustu, poskesdes, serta rumah sakit daerah. Sarana dan prasarana kerja tersebut menjadi unsur pendukung utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana dilakukan secara berkesinambungan melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemeliharaan dan optimalisasi aset daerah yang dimiliki. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan pembangunan kesehatan secara optimal.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah, kualifikasi pendidikan, jabatan, pangkat, dan golongan pegawai Dinas Kesehatan yaitu:

Tabel 2.1.2 1 Distribusi Sumber Daya Manusia

Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Total
	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SD/ Sederajat	
IV	24	175	0	0	0	0	203
III	14	411	109	5	0	0	539

Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Total
	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SD/ Sederajat	
II	0	4	68	2	2	0	76
PPPK X	0	43	8	0	0	0	51
PPPK IX	0	59	2	0	0	0	61
PPPK VII	0	0	181	0	0	0	181
Total	38	692	368	7	2	0	1111

Sumber: Bag. Umum dan Kepgawainan Dinkes, 2024

Tabel 2.1.2 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Struktural Pegawai

Jabatan Struktural	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	Jumlah
II a	0	0	0	0
II b	0	1	0	1
III a	1	0	0	1
III b	1	3	0	4
IV a	0	3	0	3
IV b	0	0	0	0
Total	2	7	0	9

Sumber: Bag. Umum dan Kepgawainan Dinkes, 2024

Tabel 2.1.2 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Fungsional Pegawai

Jabatan Fungsional	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/ Sederajat	Jumlah
Dokter Ahli Pertama	0	11	0	0	11
Dokter Ahli Muda	0	16	0	0	16
Dokter Ahli Madya	1	12	0	0	13
Dokter Gigi Ahli Pertama	0	8	0	0	8
Dokter Gigi Ahli Muda	0	10	0	0	10
Dokter Gigi Ahli Madya	1	9	0	0	10
Apoteker Ahli Pertama	0	9	0	0	9
Apoteker Ahli Muda	1	10	0	0	11
Apoteker Ahli Madya	0	9	0	0	9
Asisten Apoteker Terampil	0	1	27	0	28
Asisten Apoteker Mahir	0	0	1	0	1

Jabatan Fungsional	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/ Sederajat	Jumlah
Asisten Apoteker Penyelia	0	8	8	0	16
Bidan Terampil	0	1	76	0	77
Bidan Mahir	0	23	24	0	47
Bidan Penyelia	0	7	19	0	26
Bidan Ahli Pertama	1	27	3	0	31
Bidan Ahli Muda	3	98	2	0	103
Bidan Ahli Madya	4	35	0	0	39
Perawat Terampil	0	1	97	0	98
Perawat Mahir	0	5	5	0	10
Perawat Penyelia	0	10	22	1	33
Perawat Ahli Pertama	0	38	0	0	38
Perawat Ahli Muda	2	109	0	0	111
Perawat Ahli Madya	2	58	0	0	60
Nutrisionis Terampil	0	0	3	0	3
Nutrisionis Penyelia	0	0	1	0	1
Nutrisionis Ahli Pertama	2	5	0	0	7
Nutrisionis Ahli Muda	1	4	0	0	5
Nutrisionis Ahli Madya	3	18	0	0	21
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	19	0	0	20
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	0	6	0	0	6
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	1	7	0	0	8
Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	0	0	5	0	5
Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	0	0	1	0	1
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	11	0	0	12
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	0	8	0	0	8
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	2	9	0	0	11
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	0	12	0	0	12
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	0	3	0	0	3
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	3	13	0	0	16
Administrator Kesehatan Ahli Pertama	0	20	0	0	20

Jabatan Fungsional	S3/S2	S1/DIV	D1-D3	SMA/Sederajat	Jumlah
Administrator Kesehatan Ahli Muda	1	5	0	0	6
Administrator Kesehatan Ahli Madya	2	8	0	0	10
Terapis Gigi dan Mulut Terampil	0	3	7	0	10
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	0	3	6	0	9
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	0	3	0	0	3
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Mahir	0	1	2	0	3
Perekam Medis Terampil	0	0	8	0	8
Perekam Medis Penyelia	0	0	9	0	9
Perekam Medis Mahir	0	0	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	0	1	0	0	1
Analisis Sumber Daya Manusia	0	1	0	0	1
Aparatur Ahli Pertama					
Arsiparis Ahli Pertama	1	2	0	0	3
Teknisi Elektromedis Penyelia	0	0	2	0	2
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	0	0	16	0	16
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	0	0	8	0	8
Total	33	677	353	1	1111

Sumber: Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes, 2024

Pada tabel 2.1.2.1 diatas menunjukkan bahwa pegawai ASN yang berada pada Dinas Kesehatan beserta 18 Puskesmas sebanyak 73,63% dari total pegawai. Kemudian, pada tabel 2.1.2.2 menunjukkan bahwa pegawai pada jabatan struktural dengan latar belakang pendidikan Strata Satu sebanyak 77,87% dari total pegawai dengan jabatan struktural. Sementara itu, pada tabel 2.1.2.3 menunjukkan bahwa pada jabatan fungsional dengan latar belakang pendidikan Strata Satu sebanyak 60,94% dari total pegawai.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kantor, kendaraan dinas, serta fasilitas perlengkapan lainnya. Sarana dan

prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, koordinasi program, serta operasional pelayanan kesehatan di lapangan.

Selain fasilitas perkantoran, Dinas Kesehatan juga memiliki dan membina berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur, meliputi rumah sakit daerah, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes), dan jaringan laboratorium kesehatan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Upaya pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana prasarana dilakukan secara berkala agar tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, sistem informasi manajemen, serta sarana pendukung kegiatan promosi kesehatan dan surveilans. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana juga diarahkan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih responsif, efisien, dan berbasis teknologi digital.

Tabel 2.1.2 4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kesehatan

Puskesmas	Keadaan Pustu				Rumah Dinas Nakes				Ambulance			Sepeda Motor			Perangkat Komputer dan Laptop	
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Berfungsi	Tidak Berfungsi
Burau	2	0	4	4	0	0	4	0	1	1	0	2	2	4	20	6
Wotu	0	11	1	5	0	4	3	0	0	1	0	7	11	1	23	6
Tomoni	2	4	7	0	3	0	0	0	0	0	1	2	10	4	21	3
Tomoni Timur	0	0	2	4	0	0	4	0	0	0	0	2	4	5	20	5
Angkona	5	6	0	0	4	0	0	2	3	0	0	10	7	1	18	0
Malili	3	0	3	2	0	0	2	2	0	2	1	1	6	2	26	3
Lampia	3	0	0	3	3	1	0	2	1	0	1	7	3	0	14	3
Mahalona	1	2	0	0	3	4	0	0	2	0	0	4	0	2	14	0
Bantilang	0	2	3	0	0	2	6	0	2	0	0	3	4	0	9	3
Wawondula	2	2	0	0	4	0	0	0	0	1	1	8	2	0	35	0
Timampu	0	2	0	0	5	0	0	0	0	2	2	2	7	1	10	6
Nuha	2	1	2	2	7	0	0	0	2	0	0	7	0	2	22	4
Wasuponda	3	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	5	0	1	23	0
Mangkutana	5	3	1	4	4	0	1	0	2	0	0	14	1	2	21	0
Kalaena	3	0	2	1	2	0	1	0	2	0	0	8	0	3	21	1
Lakawali	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	5	0	2	30	3
Parumpanai	0	0	3	2	1	1	0	0	1	0	1	5	0	2	0	0
Bone Pute	0	0	1	8	1	0	0	0	1	0	0	2	5		19	0
Total	33	34	29	37	39	12	21	6	20	7	7	94	62	32	346	43

Sumber: Bag. Perencanaan Dinkes, 2024

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3 1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk		6.94	6.94	113409	127.33	91565
Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	88.34	94.05	92.81	95.73	96.88
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92.76	99.63	99.90	99.96	99.84
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	96.23	98.80	98.21	98.23	98.12
Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	69.31	94.88	93.34	92.02	93.86
Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	59.57	79.84	95.74	100	100
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	23.50	40.01	69.18	100	63.35
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	71.84	84.07	80.29	83.25	97.36
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	%	32.71	17.35	91.20	100	78.67

Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan sesuai standar						
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	29.72	55.58	100	100	100
Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	41.97	53.24	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Teninfeksi HIV	%	100	100	100	100	100
Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		100	117.16	126.26	169.48	182.19
Angka kelangsungan hidup bayi		1079.85	99862.88	99784.25	99441.59	99353.02
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup		100	1103.33	1440.24	1982.89	2125.00
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup		100	131.48	127.04	210.92	219.44
Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup		100	135.27	123.53	116.39	136.16
Rasio posyandu per satuan balita		101.18	102.72	105.08	113.69	103.26
Rasio pustesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		96.97	6.54	6.73	10.09	9.91
Rasio rumah sakit per satuan penduduk		85.71	100	100	100	100
Rasio dokter per satuan penduduk		100	108.36	109.74	114.06	111.86
Rasio tenaga medis per satuan penduduk		88.84	124.45	96.27	100.71	92.66
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	226.17	103.38	85.80	74.01	89.78
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjang yang memiliki	%	100	101.64	98.20	94.79	87.28

Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
kompetensi kebidanan						
Cakupan desa/keluarahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	104.99	106.43	106.52	102.15
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	97.59	99.58	95.10	82.27
Non polio AFP rate per 100,000 penduduk		100	86.50	60.00	165.50	175.00
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	20.78	39.27	52.08	52.45
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		100	100	100	100	100
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	16.12	18.75	19.92	14.88
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	99.31	102.60	101.40	103.16	100.53
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	100	50.37	114.55	139.27	32.70
Angka kejadian Malaria		100	100	100	100	100
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	1.00	1.00	1.00	38.00	40.00
Proporsi jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	%	100	100	104.68	113.26	128.00

Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
masyarakat miskin						
Cakupan kunjungan bayi	%	100	108.84	110.05	106.55	103.32
Cakupan puskesmas	%	100	99.76	99.76	99.76	99.76
Cakupan pembantu puskesmas	%	100	54.74	54.74	98.96	98.96
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	101.79	95.11	92.00	100.15
Cakupan pelayanan nifas	%	100	101.23	98.13	94.26	105.46
Cakupan persalinan dengan komplikasi yang ditangani	%	104.04	124.20	151.20	94.36	131.25
Cakupan pelayanan anak balita	%	100	125.53	120.79	117.95	120.47
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	341.40	224.63	7.77	8.25	196.38
Cakupan penjaringan anjangn siswa SD dan setingkat	%	59.57	78.29	95.74	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	0.09	0.08	0.07	0.09
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana anjangn (RS)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bag. Perencanaan Dinkes, 2024

Secara umum, capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan pada sebagian besar indikator kinerja kunci, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi akibat dinamika kondisi kesehatan masyarakat dan faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19. Berikut ini analisis untuk tabel 2.1.3.1 yang telah dibagi per kelompok indikator yaitu:

1. Kelompok Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar

Capaian indikator pelayanan kesehatan dasar seperti pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, serta anak usia pendidikan dasar menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024. Persentase ibu hamil dan bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terus meningkat hingga di atas 95%, mencerminkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan maternal.

Demikian pula, cakupan pelayanan bayi dan balita yang mencapai lebih dari 90% sejak tahun 2021 menunjukkan efektivitas program kunjungan rumah, posyandu aktif, serta peningkatan peran tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya. Namun, masih terdapat variasi capaian antar wilayah kecamatan yang menunjukkan perlunya penguatan peran puskesmas pembina wilayah dalam pemerataan pelayanan dasar.

2. Kelompok Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Neonatal masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Kenaikan angka kematian pada periode 2023–2024 dapat disebabkan oleh faktor keterlambatan rujukan, komplikasi kehamilan, serta keterbatasan tenaga kesehatan spesialis di daerah terpencil.

Meskipun demikian, berbagai intervensi seperti peningkatan kualitas pelayanan obstetri neonatal emergensi (PONEK dan PONED), penguatan jejaring rujukan, serta program kunjungan rumah ibu nifas telah dilaksanakan untuk menekan angka kematian tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah.

3. Kelompok Indikator Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dalam kelompok indikator penyakit menular, capaian penemuan dan penanganan Tuberkulosis, DBD, dan diare menunjukkan hasil yang baik dengan capaian 100% pada sebagian besar tahun. Hal ini menandakan keberhasilan program surveilans dan pengendalian penyakit berbasis masyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gejala dan pengobatan dini.

Namun, beberapa indikator penyakit tidak menular seperti pelayanan penderita hipertensi dan diabetes melitus (DM) sempat mengalami fluktuasi, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang membatasi akses layanan rutin. Setelah tahun 2022, cakupan pelayanan penyakit tidak menular menunjukkan tren membaik, terutama melalui implementasi Posbindu PTM dan skrining kesehatan pada kelompok usia produktif dan lansia.

4. Kelompok Indikator Sumber Daya dan Fasilitas Kesehatan

Indikator yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan juga menunjukkan perkembangan positif. Rasio puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, dan dokter terhadap jumlah penduduk meningkat dibandingkan tahun 2020, meskipun pemerataan antarwilayah masih menjadi tantangan. Persentase rumah sakit yang terakreditasi mencapai 100% secara konsisten, menandakan adanya peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan.

Sementara itu, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk juga menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai dampak penambahan fasilitas dan kapasitas layanan. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dan sumber daya kesehatan menjadi salah satu faktor utama pendukung keberhasilan program-program kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Meski demikian, tantangan masih ditemukan pada aspek penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pemerataan tenaga kesehatan antar wilayah. Diperlukan upaya lanjutan dalam bentuk peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, penguatan sistem rujukan, serta optimalisasi inovasi digital dan tata kelola yang akuntabel untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” secara berkelanjutan.

2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian standar pelayanan minimal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3 2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	88.34	94.05	92.81	95.73	96.88
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	92.76	99.63	99.90	99.96	99.84
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	96.23	98.80	98.21	98.23	98.12
Pelayanan Kesehatan Balita	%	69.31	94.88	93.34	92.02	93.86
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	59.57	79.84	95.74	100	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	23.50	40.01	69.18	100	63.35
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	71.84	84.07	80.29	83.25	97.36
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	32.71	17.35	91.20	100	78.67
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	29.72	55.58	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	41.97	53.24	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia atau HIV	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bag. Perencanaan Dinkes, 2024

Secara umum, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada sebagian besar indikator. Indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak secara konsisten menunjukkan capaian tinggi, seperti pelayanan kesehatan ibu bersalin yang meningkat dari 92,76% pada tahun 2020 menjadi 99,84% pada tahun 2024, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang bertahan di atas 98% sejak tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maternal dan neonatal semakin baik dan merata di seluruh wilayah.

Sementara itu, indikator pelayanan kesehatan bagi kelompok usia lainnya juga menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Pelayanan kesehatan balita meningkat pesat dari 69,31% pada tahun 2020 menjadi 93,86% pada tahun 2024, sedangkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan usia lanjut mencapai capaian optimal, masing-masing sebesar 100% dan 97,36% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam cakupan program kesehatan berbasis usia dan peningkatan peran tenaga kesehatan di lapangan.

Meskipun demikian, pada beberapa indikator seperti pelayanan kesehatan usia produktif dan penderita hipertensi masih menunjukkan fluktuasi capaian, yang disebabkan oleh faktor kepatuhan masyarakat terhadap pemeriksaan rutin serta keterbatasan deteksi dini penyakit tidak menular di sebagian wilayah kerja Puskesmas.

Selain itu, capaian pelayanan kesehatan untuk penyakit menular dan kelompok rentan menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil. Pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat, penderita diabetes melitus, serta orang terduga tuberkulosis telah mencapai 100% sejak tahun 2022 dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2024. Begitu pula pelayanan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV yang konsisten mencapai 100% selama lima tahun terakhir.

Capaian maksimal ini menggambarkan komitmen kuat Dinas Kesehatan dalam upaya deteksi dini, pengendalian, dan pengobatan penyakit menular serta peningkatan akses terhadap pelayanan bagi kelompok rentan. Secara keseluruhan, kinerja capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020–2024 menunjukkan keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pelayanan dasar kesehatan menuju target 100% pelayanan sesuai standar nasional.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	68.96	73.25	80.95	103.10	73.44
Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	81.50	85.36	78.89	59.00	54.88
Prevalensi Stunting	%	120.81	167.30	190	159.78	112.25
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Urusan Kesehatan	%		104.73	102.73	103.08	98.82

Sumber: Bag. Perencanaan Dinkes, 2024

Secara umum, capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan perkembangan yang relatif positif selama periode 2020–2024, meskipun masih terdapat beberapa fluktuasi pada indikator tertentu. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 103,10 sebelum menurun kembali menjadi 73,44 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan tren penurunan dari 81,50 pada tahun 2020 menjadi 54,88 pada tahun 2024, menandakan peningkatan efektivitas program kesehatan ibu dan anak serta keberhasilan intervensi pada masa neonatal. Namun, prevalensi stunting pada balita masih menjadi tantangan yang signifikan, dengan fluktuasi yang cukup tinggi dari 120,81 persen pada tahun 2020 menjadi 112,25 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, tren menurun pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya dampak positif dari berbagai program percepatan penurunan stunting yang dijalankan lintas sektor.

Dari sisi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) urusan kesehatan relatif stabil dengan capaian di atas 100 persen pada periode 2021–2023, meskipun sedikit menurun menjadi 98,82 persen di tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan daerah secara umum telah berjalan baik dan mampu menjawab

kebutuhan masyarakat, namun masih perlu peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses terutama di wilayah terpencil.

4. Capaian Suistainable Development Goals (SDG's)

Capaian Suistainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3 4 Capaian Suistainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020-

2024

Indikator	Satu an	Capaian Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan SDG's 01: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun						
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%		91.26	102.98	101.93	69.66
Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	%		101.30	107.42	106.91	106.26
Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%		119.49	117.56	99.24	89.33
Tujuan SDGs 02 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%		113.00	6.62	215.00	525.42
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%		52.14	48.24	16.77	145.87
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%		49.50	24.68	25.33	51.37
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%		14.00	188.70	257.14	2.63
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%		41.92	64.17	65.73	93.81
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%		105.63	4.88	5.72	105.01
Tujuan SDGs 03 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
Angka Kematian Ibu (AKI).			73.93	95.08	88.48	73.44
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%		100.22	106.95	94.29	105.82

Indikator	Satuan	Capaian Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%		101.30	107.42	106.91	106.26
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.			243.24	53.95	74.51	4.71
Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup			76.05	78.72	40.69	45.57
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.			85.36	78.89	53.33	54.89
Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	%		117.50	113.31	115.81	107.95
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%		100	100	100	100
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.			189.45	260.01	274.00	231.55
Kejadian Malaria per 1000 orang			100	100	100	100
Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi Malaria			100	100	100	100
Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	%		80.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah Orang yang Memerlukan Intervensi terhadap penyakit Tropis yang terabaikan			0.00	0.00	0.00	64.71
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.			0.00	0.00	0.00	100.00
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).			100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	%		0	0	0	0
Prevalensi Tekanan Darah tinggi	%		16.07	238.40	98.89	16.85
Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	%		27.89	25.00	16.76	56.75
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	%		0	0	0	0
Konsumsi Alkohol (Liter Perkapita) oleh penduduk Umur 15 tahun dalam satu tahun.			0	0	0	0
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%		102.17	111.02	99.75	100.30
Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%		100.00	100.00	90.00	100.00

Indikator	Satuan	Capaian Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
di Puskesmas.						
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%		100.00	100.00	100.00	100.00
Tujuan SDGs 06 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua						
Jumlah Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).			93.02	125.00	125.00	76.56
Jumlah Desa/ Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).			100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Bag. Perencanaan Dinkes, 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan menetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi prioritas penyelenggaraan urusan kesehatan. Kelompok sasaran ini mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan siklus kehidupan, kondisi kerentanan, serta kebutuhan khusus.

Sasaran utama meliputi ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi; balita dan anak usia sekolah untuk menjamin tumbuh kembang optimal, pencegahan stunting, dan cakupan imunisasi; serta remaja melalui pembinaan kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko. Kelompok usia produktif dan pekerja menjadi sasaran dalam upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemeliharaan kesehatan kerja, sementara kelompok lansia difokuskan pada pencegahan penyakit degeneratif dan peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, masyarakat miskin dan rentan memperoleh perhatian khusus dalam akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata, termasuk melalui program JKN. Secara umum, seluruh penduduk menjadi sasaran layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga pembangunan kesehatan dapat berjalan menyeluruh, berkeadilan, dan berkesinambungan.

2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini penting untuk memperkuat cakupan, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan yang diberikan.

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Meliputi rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, puskesmas, klinik, apotek, dan laboratorium kesehatan sebagai garda terdepan dalam pemberian layanan kuratif, rehabilitatif, serta rujukan berjenjang. Dalam hal ini, di Kabupaten Luwu Timur terdapat satu rumah sakit daerah, satu rumah sakit swasta yang merupakan milik dari perusahaan PT. Vale, 18 puskesmas, 17 klinik, 51 praktek mandiri.

2. Organisasi Profesi Kesehatan

Seperti IDI, IBI, PPNI, IAI, PERSAKMI, HAKLI, dan lainnya yang berperan dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan etika profesi, serta dukungan dalam pelaksanaan program kesehatan.

3. Mitra Lintas Sektor Pemerintah

Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas KB dan Pengendalian Penduduk, Dinas PU/PR, dan perangkat daerah lain yang relevan dalam mendukung aspek gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan, serta perlindungan kelompok rentan.

4. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)

BPJS Kesehatan menjadi Layanan Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik, dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selaku mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

5. Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas

LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK, karang taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam edukasi kesehatan,

pemberdayaan dan penggerakan masyarakat, serta penggerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

6. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sektor swasta turut mendukung penyediaan sarana kesehatan, kampanye kesehatan, serta peningkatan akses layanan bagi masyarakat.

7. Perguruan Tinggi dan Institusi Pendidikan

Sebagai mitra dalam penelitian, pengembangan inovasi pelayanan, serta penempatan mahasiswa kesehatan untuk praktik lapangan yang sekaligus memperluas jangkauan edukasi kesehatan.

Dengan menjalin kemitraan yang sinergis, Dinas Kesehatan dapat memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kualitas, serta mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kesehatan daerah, dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang signifikan sebagai mitra strategis Dinas Kesehatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan daerah tahun 2025–2029.

Peran BUMD dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan diwujudkan melalui beberapa aspek, antara lain:

a. Dukungan Pendanaan dan CSR

BUMD dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) untuk mendukung kegiatan prioritas kesehatan, seperti pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, penyediaan sarana air bersih, serta perbaikan sanitasi lingkungan. Dukungan ini memperkuat pembiayaan pembangunan kesehatan serta mengurangi ketergantungan pada APBD.

b. Penyediaan Sarana dan Infrastruktur Kesehatan

BUMD yang bergerak pada sektor energi, air minum, dan transportasi dapat berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan listrik untuk fasilitas kesehatan terpencil,

air bersih untuk Puskesmas dan rumah sakit, serta dukungan transportasi kesehatan darurat.

c. Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat

Melalui program kemitraan, BUMD dapat mendukung pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan, seperti pengembangan produk pangan bergizi, edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta kegiatan sosial lain yang mendukung upaya promotif dan preventif.

d. Dukungan Inovasi dan Digitalisasi

BUMD di bidang teknologi maupun keuangan dapat berkontribusi dalam pengembangan inovasi pelayanan kesehatan berbasis digital, integrasi data kesehatan dengan sistem informasi daerah, serta fasilitasi transaksi layanan kesehatan non-tunai guna mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

e. Penguatan Kapasitas SDM Kesehatan

BUMD juga dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui dukungan beasiswa, pelatihan, maupun riset bersama, sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan adanya dukungan BUMD tersebut, diharapkan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dapat lebih optimal, serta mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bentuk sinergi lintas sektor. Kerja sama dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial melalui program UKS, edukasi gizi, serta perlindungan masyarakat miskin dan rentan. Dengan Dinas PU/PR dan Dinas Ketahanan Pangan, kolaborasi difokuskan pada penyediaan air bersih, sanitasi, serta peningkatan status gizi masyarakat. Selain itu, Bappeda dan pemerintah daerah tetangga menjadi mitra strategis dalam sinkronisasi perencanaan, rujukan layanan, dan penanganan KLB. Dinas Kesehatan juga bermitra dengan rumah sakit swasta, organisasi

profesi, serta perguruan tinggi untuk memperkuat mutu layanan dan kapasitas tenaga kesehatan, serta mengandeng dunia usaha dan LSM dalam mendukung program kesehatan melalui CSR, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Dinas Kesehatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kematian ibu	Masih adanya kasus kematian ibu	Belum maksimalnya pelaksanaan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)
		Komplikasi kehamilan/persalinan	Masih tingginya kasus pernikahan usia dini dan kasus kehamilan yang tidak diinginkan
			Masih tingginya kasus anemia pada remaja putri, WUS (Wanita Usia Subur), PUS (Pasangan Usia Subur) dan ibu hamil
			Masih adanya kasus abortus dan aborsi pada KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan)
			3 terlambat (tanda bahaya, keputusan, rujukan)
2	Kematian bayi	Masih adanya kasus kematian bayi	Pelayanan neonatal belum optimal
		Belum tercapainya ASI Eksklusif	Deteksi dini risiko bayi rendah
		Stunting	Masih adanya ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet Fe minimal 90 tablet selama masa kehamilan
		Gizi kurang dan gizi buruk	Masih kurangnya pengetahuan calon pengantin atau calon ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya untuk persiapan kehamilan
			Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			minimal 6 kali selama masa kehamilan
			Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya menurunkan angka kematian bayi
			Masih kurangnya dukungan keluarga terhadap kesehatan ibu hamil
3	Stunting pada balita	Prevalensi stunting masih tinggi	Asupan gizi ibu hamil dan balita tidak optimal
		Pola asuh dan gizi kurang baik	ASI eksklusif dan MP-ASI kurang berkualitas
		Akses pangan bergizi rendah	Kondisi sanitasi dan air bersih yang masih kurang memadai
			Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh dan gizi seimbang
			Akses pangan bergizi dan layanan kesehatan belum merata
4	Penyakit menular	Masih tingginya angka kejadian penyakit menular	Belum optimalnya surveilans, tracing, dan imunisasi
			Angka kesakitan penyakit DBD masih melebihi target nasional
			Kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk mempercepat penularan, kasus dominan berada pada daerah padat/ daerah pertambangan PT. Vale.
			Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti Mikroskop dan obat malaria (DHP dan Primaquin), cartridge, alat TCM, RDT dan lainnya
			Masih kurangnya motivasi diri penderita untuk minum obat ARV, efek samping obat, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan teman sebaya
5	Penyakit tidak menular	Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular	Pola hidup tidak sehat (merokok, diet buruk, kurang aktivitas fisik)
			Fasilitas skrining PTM yang masih terbatas
			Masih kurangnya ketersediaan obat hipertensi dan diabetes pada FKTP serta masih rendahnya kepatuhan untuk minum obat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Edukasi kesehatan masyarakat masih belum efektif
			Masih terbatasnya tenaga kesehatan terutama untuk kesehatan jiwa
6	Sumber daya kesehatan	Keterbatasan sumber daya kesehatan	Belum terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan esensial, serta peningkatan pelayanan ke fasyankes
		Ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan	Belum terpenuhinya ketersediaan 9 tenaga kesehatan minimal disetiap puskesmas sesuai PMK No.19 Tahun 2024
			Belum tersedianya alat kesehatan yang dibutuhkan oleh puskesmas sesuai standar berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014 dan PMK No. 14 Tahun 2021

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah masalah-masalah penting, mendasar, dan krusial yang harus diperhatikan serta ditangani secara prioritas oleh pemerintah daerah karena berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam bidang kesehatan, isu strategis mencerminkan tantangan utama yang sedang dan akan dihadapi, baik dalam jangka menengah (Renstra Tahun 2025–2029) maupun jangka panjang, yang membutuhkan solusi terpadu, lintas sektor, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur, ditinjau dari gambaran pelayanan kesehatan dan isu yang berkembang saat ini, terdapat beberapa isu strategis yang dianggap prioritas dalam menentukan arah kebijakan dan fokus kegiatan sektor kesehatan.

Isu-isu strategis tersebut memiliki keterkaitan erat dengan isu lingkungan hidup yang dikaji melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), karena berbagai permasalahan kesehatan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan. Tantangan seperti peningkatan penyakit berbasis lingkungan, kualitas air dan sanitasi yang belum optimal, serta pengelolaan

limbah medis yang memerlukan perhatian lebih, mencerminkan hubungan langsung antara sektor kesehatan dan lingkungan hidup.

Melalui integrasi isu strategis kesehatan dengan isu KLHS, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan kesehatan dilaksanakan secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera melalui pembangunan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2.1.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kesehatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Kesehatan			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya jaringan fasilitas kesehatan yang cukup luas meliputi rumah sakit, puskesmas, dan posyandu di seluruh wilayah kecamatan.	Masih ditemukan kasus kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) yang fluktuatif serta rendahnya cakupan posyandu aktif.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan AKI dan AKB.	Penurunan kematian ibu dan bayi; SDGs 3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan			1. Masih ditemukan kasus kematian ibu dan bayi. 2. Masih rendahnya cakupan posyandu aktif.
Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pangan dan pertanian lokal yang mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga.	Masih tingginya angka stunting dan masalah gizi lainnya akibat pola konsumsi dan perilaku hidup yang belum optimal.	Upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi spesifik dan sensitif.	SDGs poin 2 (Zero Hunger) dan 3 (Good Health).	Prioritas penurunan stunting dan peningkatan status gizi balita; dukungan kebijakan RAN PASTI.		3. Masih tingginya prevalensi stunting dan masalah gizi lain. 7. Penerapan perilaku hidup sehat di masyarakat masih rendah.
Tersedianya tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan dasar dan dukungan program pendidikan tenaga medis.	Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar dan kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam imunisasi.	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan optimalisasi pelayanan dasar di puskesmas.		Peningkatan mutu SDM tenaga kesehatan serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai Permenkes No. 19 Tahun 2024.		10. Kurangnya komitmen multisektoral dalam imunisasi. 13. Belum terpenuhinya 9 tenaga kesehatan minimal per puskesmas.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Kesehatan			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
Ketersediaan infrastruktur kesehatan dan dukungan logistik untuk pelayanan dasar yang terus berkembang.	Masih kurangnya ketersediaan BMHP, alat kesehatan, dan sarana prasarana sesuai standar Permenkes.	Peningkatan sistem logistik kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.		Penguatan sistem kesehatan dasar dan penyediaan alat kesehatan standar di fasilitas pelayanan publik.		3. Kurangnya ketersediaan BMHP. 14. Belum terpenuhinya alat kesehatan sesuai standar.
Adanya dukungan masyarakat terhadap gerakan PHBS dan program lingkungan sehat berbasis masyarakat.	Masih ada dua pilar STBM yang belum memenuhi target dan belum terbentuknya desa iklim di kabupaten.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.			Pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah domestik, dan penguatan desa ramah lingkungan.	4. Pilar STBM belum terpenuhi. 5. Belum terbentuknya desa iklim.
Tersedianya fasilitas pemeriksaan penyakit tidak menular dan layanan usia lanjut di puskesmas.	Beban ganda penyakit (menular dan tidak menular) serta kurangnya skrining kesehatan kerja bagi pekerja.	Peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular dan promosi kesehatan kerja.	Peningkatan prevalensi PTM dan pentingnya sistem kesehatan adaptif terhadap penyakit kronis.			6. Kurangnya skrining kesehatan kerja. 9. Beban ganda penyakit (menular dan tidak menular).

Isu strategis yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang sedang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukan kasus kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) yang masih fluktuatif cenderung meningkat.
2. Masih tingginya angka prevalensi stunting disertai dengan masalah gizi lainnya
3. Masih kurangnya ketersediaan BMHP (strip GDS, kolesterol, asam urat) pada pelayanan skrining usia lanjut dan skrining penyakit tidak menular.
4. Masih ada dua pilar STBM yang belum memenuhi target yaitu Pilar 4 Pengelolaan sampah rumah tangga dan Pilar 5 Pengelolaan limbah cair rumah tangga.
5. Belum terbentuknya desa iklim di kabupaten dan masih mengacu pada desa program iklim di Dinas Lingkungan Hidup.
6. Masih kurangnya skrining kesehatan kerja bagi para pekerja dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
7. Cakupan PHBS telah mencapai target, tetapi penerapan perilaku hidup sehat di masyarakat masih rendah.
8. Masih rendahnya cakupan posyandu aktif pelayanan siklus hidup
9. Beban Ganda Penyakit (*Double Burden of Disease*)
Di satu sisi, penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, DBD, dan malaria masih menjadi masalah. Di sisi lain, penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit jantung semakin meningkat akibat perubahan gaya hidup. Kondisi ini menimbulkan beban ganda bagi sistem pelayanan kesehatan.
10. Masih kurangnya keterlibatan multisektoral dan komitmen pemerintah daerah dalam program imunisasi
11. Belum tercapainya indikator SPM urusan kesehatan.
12. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan esensial, serta peningkatan pelayanan ke fasyankes
13. Belum terpenuhinya ketersediaan 9 tenaga kesehatan minimal di setiap puskesmas sesuai Permenkes No. 19 Tahun 2024
14. Belum terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh puskesmas sesuai standar berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan Permenkes No. 14 Tahun 2021

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran merupakan komponen utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan yang berfungsi sebagai arah kebijakan dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tujuan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahunan, sedangkan sasaran menunjukkan hasil yang lebih terukur dari pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunannya juga memperhatikan hasil analisis terhadap isu strategis, kondisi pelayanan kesehatan, capaian pembangunan periode sebelumnya, serta mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

Tujuan strategis merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan sebagai arah kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Perumusan tujuan dilakukan berdasarkan isu strategis daerah, analisis masalah pokok kesehatan, serta mengacu pada RPJMD Kabupaten, Renstra Kementerian Kesehatan, dan target nasional (SDGs dan SPM Kesehatan).

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 adalah:

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”

Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi, di antaranya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah

1. Misi ke-1 (M1): Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing, dengan Tujuan (T1): Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Misi ke-5 (M5): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital, dengan Tujuan (T6): Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuan strategis yaitu,

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan. Sasaran ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, serta diarahkan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

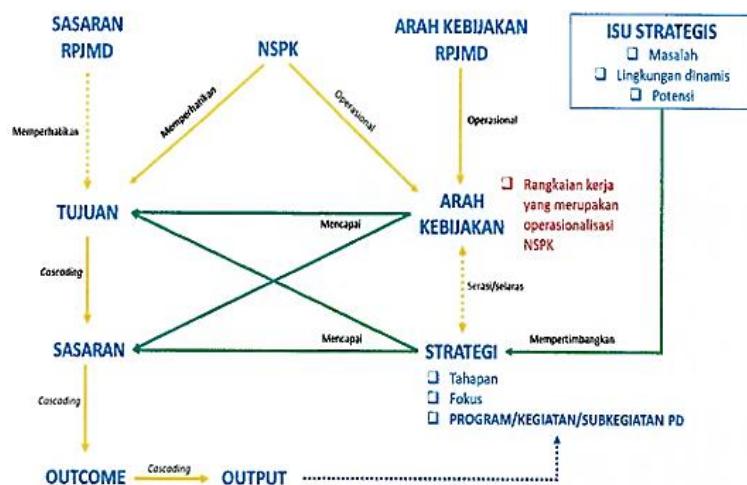
Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menetapkan dua sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, yang mencerminkan upaya peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi hasil melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan.

Rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra ini menggambarkan arah strategis Dinas Kesehatan dalam mewujudkan masyarakat Luwu Timur yang sehat, produktif, dan sejahtera melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

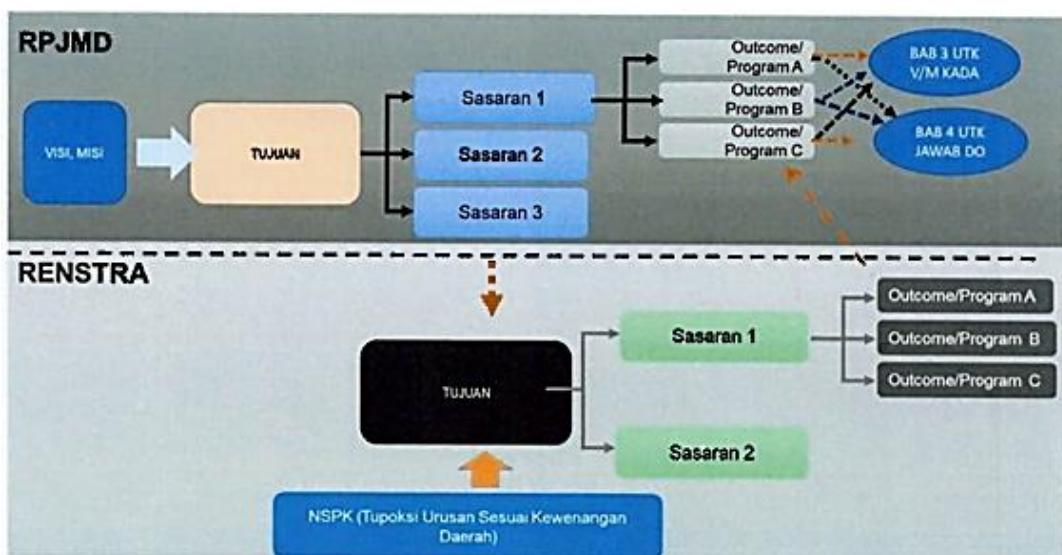
Berikut konsep Renstra perangkat daerah dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra perangkat daerah serta rumusan tujuan dan sasaran Renstra.

Gambar 3.1 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmen No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmen No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Indikator Tujuan					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,75	74,95	75,15	75,35	75,55	75,55
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	141,21	119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,.26
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	14,12	13,33	12,83	12,29	11,76	11,24	11,24
		Prevalensi Stunting pada Balita	%	21,8	20.50	19.2	17.9	16.6	15.3	14
		Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 pddk	190	190	185	180	175	170	170
		Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio	0,056	0.055	0.055	0.056	0.056	0.057	0.057
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,60	75,01	75,50	76,01	76,50	77,01	77,50

Berdasarkan pemahaman diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berarti meningkatkan kualitas kesehatan individu dan kelompok dalam suatu komunitas agar mereka dapat hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial. Ini adalah tujuan utama dari upaya kesehatan masyarakat dan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

Dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat kabupaten luwu timur dapat diukur dengan indikator usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi penyakit menular dan tidak menular, status gizi masyarakat serta akses terhadap layanan kesehatan. Sementara itu, tujuan meningkatkan derajat kesehatan agar masyarakat bisa produktif secara sosial dan ekonomi, menurunkan beban biaya kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Sasaran Strategis I: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat merupakan perbaikan dalam mutu pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan (seperti puskesmas, rumah sakit, klinik) kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan manusiawi. Kondisi yang ingin dicapai pada sasaran kinerja ini yaitu menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka prevalensi stunting, menurunnya angka insidensi tuberkulosis dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian ibu yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesehatan maternal (ibu) di suatu negara atau daerah.	AKI mencerminkan kualitas sistem kesehatan, kesejahteraan perempuan, dan pembangunan suatu negara. Tingginya AKI menandakan masih banyak tantangan dalam sistem kesehatan ibu, termasuk pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca-persalinan.	(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKB menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara atau wilayah.	AKB mencerminkan tingkat kesejahteraan, kualitas layanan kesehatan, serta keberhasilan program kesehatan ibu dan anak dalam suatu negara atau wilayah. Penyajian kondisi AKB secara tepat memberikan banyak manfaat strategis, sosial, dan kebijakan. Tingginya AKB menunjukkan masalah serius dalam pemenuhan hak anak atas hidup, kesehatan, dan gizi.	(Jumlah bayi usia dibawah satu tahun yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu) dibagi (Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama) dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting pada Balita	Prevalensi stunting pada balita merupakan persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (sejak janin hingga usia 2 tahun). Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak jauh di bawah standar usianya. Ini bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar.	Menggambarkan kondisi prevalensi stunting pada balita sangat relevan untuk mendorong perubahan kebijakan, memperkuat intervensi gizi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Ini adalah fondasi untuk mencetak generasi Indonesia emas di masa depan. Prevalensi stunting mencerminkan status gizi jangka panjang anak-anak. Menunjukkan seberapa baik masyarakat dan negara memenuhi kebutuhan dasar anak: makanan bergizi, kesehatan, dan lingkungan yang layak.	(Jumlah balita pendek dan sangat pendek) dibagi (Jumlah balita yang diukur indeks PB/U atau TB/U) dikali 100	Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Insidensi Tuberkulosis	Insidensi Tuberkulosis (TBC) ini digunakan untuk mengukur penyebaran penyakit dan efektivitas program pengendalian TBC di masyarakat. Insidensi TBC adalah indikator penting untuk memahami seberapa luas penyebaran penyakit ini. Dengan mengetahui angka insidensi, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mengendalikan dan menurunkan jumlah kasus TBC.	Menggambarkan kondisi insidensi tuberkulosis sangat relevan untuk memahami dinamika penularan, menilai efektivitas intervensi, dan merancang kebijakan pengendalian yang lebih tepat. Ini juga mendukung upaya menciptakan masyarakat yg lebih sehat dan bebas TBC. TBC merupakan penyakit menular kronis yg berdampak besar pd kesehatan masyarakat, produktivitas nasional, dan sistem layanan kesehatan. Informasi tentang insidensi TBC menjadi dasar bagi tindakan preventif, kuratif, dan keb kesehatan publik.	(Jumlah kasus baru dan kambuh TB) dibagi (Jumlah penduduk pada periode tertentu) dikali 100.000	Bidang Pencegahan dan pengendalian Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk adalah perbandingan jumlah Puskesmas yang tersedia dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), sehingga jumlah dan sebarannya sangat menentukan keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat.	Indikator ini relevan digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesehatan masyarakat karena, <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan kebutuhan masyarakat. Semakin baik rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, semakin besar aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Menjadi dasar dalam perencanaan distribusi dan pembangunan fasilitas kesehatan baru. Mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok/ desa. 	(Jumlah puskesmas) dibagi (Jumlah Penduduk pada periode tertentu) di kali 30.000	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Sasaran Strategis II: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik merujuk pada upaya untuk memperbaiki dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan. Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih baik, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga, serta menciptakan kepuasan dan kepercayaan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik, serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi yang ingin dicapai pada sasaran kinerja ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai AKIP perangkat daerah.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Adalah ukuran atau skor yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah, yang menunjukkan sejauh mana instansi tersebut telah berhasil menetapkan, melaksanakan, mengukur, mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan.	Memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana perangkat daerah menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja, serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Nilai AKIP bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi strategis dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara optimal.	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja Dinas Kesehatan dan LHE Inspektorat

3.3 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan instrumen kebijakan dari pemerintah pusat yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk urusan kesehatan. Keberadaan NSPK menjadi sangat penting karena:

1. Menjamin keterpaduan kebijakan pusat dan daerah, sehingga arah pembangunan kesehatan daerah sejalan dengan kebijakan nasional.
2. Memberikan acuan baku dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja Renstra daerah agar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah.
3. Mencegah disparitas pelayanan kesehatan antar daerah dengan memastikan adanya standar minimum yang harus dicapai.

Berikut unsur Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Bidang Kesehatan dalam Penyusunan Sasaran Strategis dan Program
Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Unsur NSPK	NSPK dalam Bidang Kesehatan	Relevansi dalam Renstra Dinas Kesehatan 2025–2029
Norma	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (UU No. 	Menjadi dasar perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran kesehatan daerah agar berorientasi pada hak

Unsur NSPK	NSPK dalam Bidang Kesehatan	Relevansi dalam Renstra Dinas Kesehatan 2025–2029
	<p>36/ 2009 tentang Kesehatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. 	masyarakat untuk sehat.
Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Permenkes No. 4/2019, diperbarui dengan Permenkes No. 6/2024). • Standar sarana dan prasarana Puskesmas, RS, dan laboratorium kesehatan. • Standar kompetensi tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, sanitarian, dll.). 	Digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam Renstra, misalnya persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar, cakupan imunisasi dasar lengkap, dll.
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pelayanan rujukan berjenjang (sesuai Permenkes No. 1/2012). • Prosedur pelayanan imunisasi dasar lengkap. • Prosedur surveilans penyakit menular dan penanganan KLB. 	Menjadi acuan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan, khususnya terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Puskesmas terakreditasi minimal tingkat dasar. • Kriteria rumah sakit memenuhi standar kelas sesuai regulasi. • Kriteria keberhasilan program penurunan stunting: prevalensi <14% pada 2029. 	Menjadi tolok ukur keberhasilan Renstra, dituangkan dalam indikator sasaran dan target kinerja kesehatan daerah.

3.4 Strategi Dinas Kesehatan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi Dinas Kesehatan

Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1 3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Perencanaan peningkatan mutu layanan dasar	Rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana puskesmas	Digitalisasi layanan dan sistem informasi puskesmas	Pendampingan akreditasi puskesmas	Integrasi sistem dan evaluasi menyeluruh
		Penempatan dan pelatihan SDM kesehatan	Pengembangan layanan telemedisir percontohan	Monitoring mutu dan kepuasan masyarakat	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penguatan sistem perencanaan & pelaporan kinerja	Pengembangan sistem informasi kinerja terintegrasi	Peningkatan kualitas data kinerja dan pelaporan	Evaluasi dan penguatan budaya kinerja	Pemantapan manajemen kinerja dan SAKIP

3.5 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

Arah kebijakan ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan ini juga memperhatikan hasil analisis kondisi eksisting, isu strategis daerah, serta potensi dan permasalahan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Melalui perumusan arah kebijakan ini, diharapkan pembangunan kesehatan daerah mampu menjawab berbagai tantangan, seperti peningkatan mutu layanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, penguatan sistem kesehatan daerah, serta digitalisasi tata kelola kesehatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman bagi setiap bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan

dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 3.1 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Pemenuhan jenis layanan SPM kesehatan di Puskesmas dan RS daerah	SPM menjadi prioritas utama daerah
Sistem surveilans dan penanggulangan penyakit menular	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Penguatan surveilans penyakit menular dan tidak menular di semua fasilitas kesehatan	Mendukung upaya deteksi dini dan respon cepat
Peningkatan mutu tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Pelatihan dan distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah	Untuk pemerataan akses layanan
Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Optimalisasi program KIA dan gizi di layanan primer	Kontribusi terhadap indikator RPJMD
Penerapan manajemen mutu fasilitas kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Peningkatan akreditasi Puskesmas, RSUD, dan laboratorium daerah	Meningkatkan kepercayaan dan keselamatan pasien
Digitalisasi layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah (Sikda, P-Care, ePuskesmas, dll.)	Mendukung integrasi data dan efisiensi layanan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET
Penanggulangan stunting dan gizi buruk	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif di wilayah prevalensi tinggi	Sesuai arahan nasional dan RPJMN
Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua dan penyelesaian masalah kesehatan melalui kerjasama multipihak di bidang kesehatan	Penguatan program imunisasi rutin dan tambahan di seluruh wilayah	Menekan angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin

Arah kebijakan yang telah dirumuskan pada tabel di atas merupakan tindak lanjut dari hasil operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang kesehatan sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya. NSPK tersebut menjadi acuan normatif dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterpaduan antara NSPK, arah kebijakan, dan strategi pelaksanaan menjadi dasar penting bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan kesehatan diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta mendukung terwujudnya masyarakat Luwu Timur yang maju dan sejahtera.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kesehatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

1. Uraian Program pada Dinas Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan outcome meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Indikator pada program ini adalah:

- Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar dengan target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030

- Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
 - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
 - Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
 - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan outcome Meningkatnya Kualitas dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Indikator pada program ini adalah Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dengan target kinerja 83% pada tahun 2025 dan menjadi 84% pada tahun 2030.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan outcome meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.
- Indikator pada program ini adalah Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan target kinerja 100% dari tahun 2026 hingga tahun 2030.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan outcome meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- Indikator pada program ini adalah Persentase desa/ kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif dengan target kinerja 50% pada tahun 2025 dan menjadi 80% pada tahun 2030.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan outcome meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi.
- Indikator program ini adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030

2. Uraian Kegiatan pada Dinas Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan uraian kegiatan:

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan output tersedianya penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah kabupaten kota sesuai standar.

Indikator pada pada kegiatan ini adalah:

- Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan sesuai standar dengan target kinerja 77,14% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2030. Penentuan realisasi kinerja ini mengacu pada capaian sarana pada aplikasi aspak
- Persentase pemenuhan obat, alkes, dan BHP yang tersedia dengan target kinerja 29% pada tahun 2026 menjadi 30% pada tahun 2030.
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan output meningkatnya kualitas layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat kewenangan daerah kabupaten/ kota.

Indikator pada kegiatan ini adalah :

- Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Aktif dengan target kinerja 95% tahun 2025 menjadi 98 % pada tahun 2030
- Persentase persalinan difasilitas kesehatan dengan target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga 2030
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi Paripurna dengan target kinerja 0% di tahun 2025 dan 58.14% hingga tahun 2030. Pada tahun 2025 ditetapkan nol target karena pada tahun tersebut tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang di akreditasi dan di re-akreditasi.
- Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM dengan target kinerja 55% pada tahun 2025 dan menjadi 80% pada tahun 2030.

- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan output kegiatan terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.

Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase fasilitas kesehatan yang menjalankan sistem informasi dengan target kinerja 100% 2025 sampai dengan 2030.

- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan output kegiatan Terlaksananya penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya dengan target kinerja 13% pada tahun 2025 dan 14% pada tahun 2030

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dengan uraian kegiatan:

- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota dengan output kegiatan Terlaksananya pemberian izin peraktek tenaga kesehatan.

Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP/ SIK dengan target kinerja 51,02% pada tahun 2025 menjadi 76,06% pada tahun 2030.

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota dengan output Tersedianya kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota.

Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase fasilitas kesehatan dengan 9 jenis tenaga sesuai standar dengan target kinerja 72,22% pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan output kegiatan Meningkatnya pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM.

Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dengan target kinerja 1,01% pada tahun 2025 menjadi 2,53% pada tahun 2030.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Dengan uraian kegiatan:

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan output kegiatan Terselenggaranya pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional.

Indikator dari kegiatan ini adalah cakupan pengawasan sarana kefarmasian dengan target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030

- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan output kegiatan Terselenggaranya penerbitan rekomendasi sertifikat produk PIRT.

Indikator dari kegiatan ini adalah Cakupan Industri yang memiliki sertifikat PIRT dengan target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga dengan output kegiatan Meningkatnya keamanan pangan produk pangan Industri Rumah Tangga

Indikator dari kegiatan ini adalah Persentase sarana PIRT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan target kinerja 100% dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dengan uraian kegiatan:

- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota dengan output kegiatan Menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dengan indikator kegiatan Persentase Posyandu Siklus Hidup dengan target kinerja 75% dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan uraian kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD dengan indikator Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah dengan indikator Persentase realisasi anggaran
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel. Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase aset teradministrasi
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersedianya laporan pendapatan perangkat daerah dengan indikator kegiatan Persentase Realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien. Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase layanan administrasi tepat waktu
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Indikator pada kegiatan ini adalah Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun indikator pada kegiatan ini adalah Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik dengan indikator Persentase barang dipelihara secara berkala
3. Uraian Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota, dengan uraian sub kegiatan
 - Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
 - Pembangunan puskesmas
 - Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
 - Pengembangan puskesmas
 - Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
 - Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman dan fasilitas kesehatan
 - Distribusi alat kesehatan, obat, BHP/ BMHP, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan uraian sub kegiatan
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
 - pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

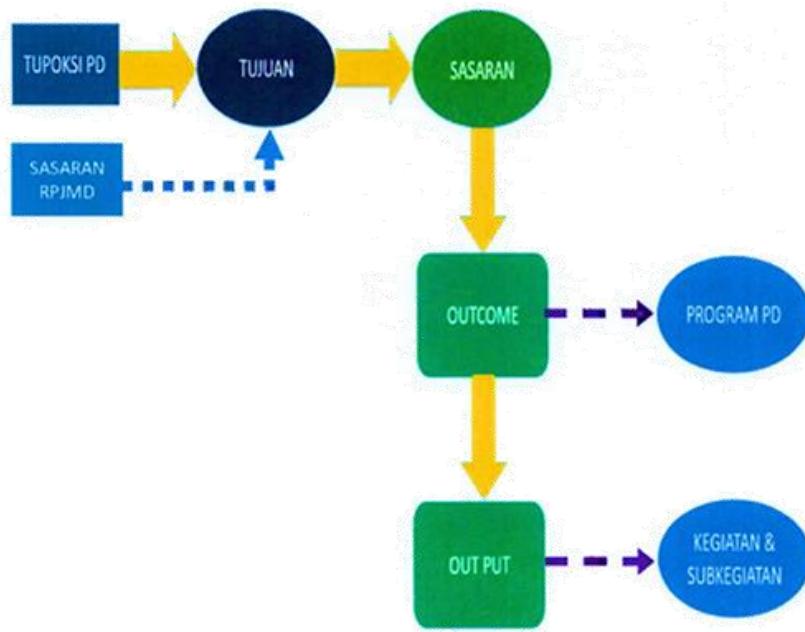
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana
- Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
- Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
- Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
- Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
- Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
- Pengelolaan surveilans kesehatan
- Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
- Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah
- Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional
- Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat
- Operasional pelayanan puskesmas
- Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
- Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota
- Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria
- Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
- Pengelolaan layanan imunisasi
- Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik
- Pengelolaan pelayanan kesehatan haji

- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan sub kegiatan
 - Pengelolaan sistem informasi kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan uraian sub kegiatan
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
- e. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota, dengan uraian sub kegiatan
 - Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
- f. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota, dengan uraian kegiatan sub kegiatan
 - Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
- g. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan uraian sub kegiatan
 - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota
- h. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan uraian sub kegiatan
 - Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- i. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan uraian sub kegiatan
 - Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

- j. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan uraian sub kegiatan
 - Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
- k. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan uraian sub kegiatan
 - Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
- l. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan uraian sub kegiatan
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- m. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan uraian sub kegiatan
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
- n. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan uraian sub kegiatan
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- o. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan uraian sub kegiatan
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- p. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan uraian sub kegiatan
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- q. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan uraian sub kegiatan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD
- r. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan uraian sub kegiatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- s. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan uraian sub kegiatan
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- t. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan uraian sub kegiatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**Gambar 4.1 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Dinas Kesehatan**



Sumber: Inmen No. 2 Tahun 2025

Tabel 4.1 1 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Usia Harapan Hidup	
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Menurunnya jumlah kematian ibu		Angka Kematian Ibu	
			Menurunnya jumlah kematian bayi		Angka Kematian Bayi	
			Menurunnya jumlah balita pendek dan sangat pendek		Prevalensi Stunting pada Balita	
			Meningkatnya keberhasilan pengobatan tuberkulosis		Insidensi Tuberkulosis	
			Meningkatnya akses layanan kesehatan dasar		Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya tata kelola program dan layanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya		Percentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Masyarakat
					Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	
					Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
					Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
					Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	
			Meningkatnya Kualitas dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.		Persentase desa/ kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Berjalannya penunjang urusan perangkat daerah sesuai standard.		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				Tersedianya penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKP dan UKM kewenangan daerah kabupaten kota sesuai standar	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					Persentase pemenuhan obat, alkes, dan BHP yang tersedia	
				Meningkatnya kualitas layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat kewenangan daerah kabupaten/ kota	Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Aktif	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
					Persentase persalinan difasilitas kesehatan	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi Paripurna	
					Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	
				Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.	Persentase fasilitas kesehatan yang menjalankan sistem informasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
				Terlaksananya penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya pemberian izin peraktek tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP/ SIK	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota
				Tersedianya kebutuhan dan pelayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan	Persentase fasilitas kesehatan dengan 9 jenis tenaga sesuai standar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota		UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
				Terselenggaranya pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Cakupan pengawasan sarana kefarmasian	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Terselenggaranya penerbitan rekomendasi sertifikat produk PIRT	Cakupan Industri yang memiliki sertifikat PIRT	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
				Meningkatnya keamanan pangan produk pangan Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PIRT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Persentase Posyandu Siklus Hidup	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel	Persentase teradministrasi aset	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Tersedianya laporan pendapatan perangkat daerah	Persentase Realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
				Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat,	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien		
				Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
				Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	Pembangunan Puskesmas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
				Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sdm agar sesuai standar	Pengembangan Puskesmas
				Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sdm agar sesuai standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
				Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana , prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Sesuai Standar	kesehatan sesuai standar	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Gangguan Jiwa Berat
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
				Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
				Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
				Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas
				Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
				Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
				Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Malaria	kesehatan malaria	
				Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi
				Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
				Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga
				Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
					disediakan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.1 2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			270,654,036,013		324,738,524,735		367,747,988,632		407,617,676,643		472,413,153,838		500,918,019,938	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100	100	6,287,558,250	100	200,115,807,391	100	210,850,847,012	100	215,976,939,267	100	234,657,493,930	100	253,676,589,130
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD	Percentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100	100	79,012,800	100	2,601,505,496		2,689,061,012		2,768,700,210		3,015,694,914		3,167,795,660
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	36,465,000	2	500,289,518	2	517,127,118	2	532,442,348	2	579,941,330	3	609,191,473
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2	5,310,000	2	800,463,230	2	827,403,388	2	851,907,757	2	927,906,127	2	974,706,357
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2	2	2,160,000	2	500,289,518	2	517,127,118	2	532,442,348	2	579,941,330	2	609,191,473
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	10	35,077,800	10	800,463,230	10	827,403,388	10	851,907,757	10	927,906,127	10	974,706,357
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Percentase realisasi anggaran	100	100	175,525,000	100	180,124,093,774	1691	190,165,762,318	1691	194,569,649,636	1691	211,459,840,746	1691	229,308,930,217
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1111	1118	134,748,181,075	1691	178,763,500,399	1691	188,759,377,207	1691	193,121,613,040	1691	209,882,625,350	1691	227,652,165,781
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18	18	123,164,750	18	1,360,593,375	18	1,406,385,111	18	1,448,036,596	18	1,577,215,396	18	1,656,764,436
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Tersedianya dokumen dan laporan aset	Percentase aset	100	100	32,721,000	100	500,289,518		517,127,118		532,442,348		579,941,330		609,191,473

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel.	teradministrasi													
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	2	32,721,000	2	500,289,518	2	517,127,118	2	532,442,348	2	579,941,330	2	609,191,473
1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
Tersedianya laporan pendapatan perangkat daerah	Persentase Realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	100	9,200,000	100	500,289,518		517,127,118		532,442,348		579,941,330		609,191,473
1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4	4	9,200,000	4	500,289,518	4	517,127,118	4	532,442,348	4	579,941,330	4	609,191,473
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100	100	178,584,000	100	2,001,158,074		2,068,508,470		2,239,365,099		2,319,765,319		2,436,765,891
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya														
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	-	1691	831,250,277	1691	859,226,595	1691	930,197,810	1691	963,594,825	1691	1,012,195,063
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12	102,539,000.00	12	431,018,662	12	445,524,901	12	482,324,791	12	499,641,761	12	524,841,884
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10	10	76,045,000	10	738,889,135	10	763,756,974	10	826,842,498	10	856,528,733	10	899,728,944
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100	100	297,160,450	100	6,603,821,545		6,826,077,943		7,028,238,995		7,655,225,550		8,041,327,441
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	9,400,000	1	501,218,599	1	518,087,467	1	533,431,139	1	581,018,330	1	610,322,793
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	2	6,207,400,	2	584,755,032	2	604,435,378	2	622,336,329	2	677,854,718	2	712,043,259

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	16,244,500	1	668,291,465	1	690,783,289	1	711,241,519	1	774,691,107	1	813,763,724
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	17,767,050	3	751,827,898	3	777,131,200	3	800,146,708	3	871,527,495	3	915,484,190
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	10,200,000	12	250,609,200	12	259,043,733	12	266,715,569	12	290,509,165	12	305,161,397
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu														
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15	15	17,759,600	15	292,377,516	15	302,217,680	15	311,168,164	15	338,927,359	15	356,021,629
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	227	227	219,581,900	150	3,554,741,835	150	3,674,379,196	150	3,783,199,567	150	4,120,697,376	150	4,328,530,449
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100	100	1,223,875,000	100	3,001,737,111		3,102,762,705		3,194,654,089		3,479,647,977		3,655,148,837
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5	3	853,800,000	0	-	0	-	1	1,204,138,849	0	-	0	-
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	29	29	146,100,000	29	545,770,384	29	564,138,674	29	491,485,244	29	859,172,340	29	902,505,886
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	5	175,525,000	10	1,091,540,768	15	1,128,277,347	10	982,970,489	10	1,718,344,680	10	1,805,011,771
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	3	48,450,000	3	1,364,425,959	3	1,410,346,684	3	516,059,507	3	902,130,957	3	947,631,180
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100	100	3,889,310,000	100	2,401,389,689		2,482,210,164		2,555,723,271		2,783,718,382		2,924,119,069
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5000	5000	8,655,000	5000	487,238,488	5000	503,636,845	5000	518,552,548	5000	564,812,425	5000	593,299,521

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	157,080,000	12	783,061,855	12	809,416,358	12	833,388,023	12	907,734,255	12	953,517,088
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	3,723,575,000	12	1,131,089,346	12	1,169,156,961	12	1,203,782,700	12	1,311,171,702	12	1,377,302,460
1.02.01.2.09.0001 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Percentase barang dipelihara secara berkala	100	100	402,170,000	100	2,381,522,666		2,482,210,164		2,555,723,271		2,783,718,382		2,924,119,069
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23	23	160,960,000	23	798,671,164	23	825,551,009	23	850,000,518	23	925,828,744	23	972,524,197
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	43	43	41,210,000	43	701,461,473	43	725,069,657	43	746,543,312	43	813,142,160	43	854,154,109
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	2	200,000,000	2	881,390,029	2	931,589,498	2	959,179,441	2	1,044,747,478	2	1,097,440,763
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	96.88	100	122,774,303,276	100	109,250,088,858	100	141,731,637,777	100	174,768,862,704	100	220,728,940,870	100	230,966,217,635
	Percentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99.84	100		100		100		100		100		100	
	Percentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98.12	100		100		100		100		100		100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93.86	100		100		100		100		100		100	
	Percentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100	
	Percentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	63.35	100		100		100		100		100		100	
	Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.36	100		100		100		100		100		100	
	Percentase pelayanan	78.67	100		100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kesehatan penderita hipertensi sesuai standar													
	Percentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100	
	Percentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100	
	Percentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100	
	Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100		100		100		100		100		100	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota														
Terlaksananya penyediaan faskes untuk UKM UKP kewenangan daerah Kabupaten / kota sesuai standar	Percentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan sesuai standar	77.14	77.14	56,280,178,208	77.14	54,603,388,576	78	70,640,855,931	78	86,446,531,379	80	110,750,515,242	80	116,602,560,611
	Percentase pemenuhan obat, alat kesehatan, dan Bahan Habis Pakai yang tersedia	8	29		29		29		30		30		30	
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	0	2	14,279,471,648	3	44,595,131,746	3	57,954,599,648	3	70,440,958,644	3	92,430,158,021	3	95,944,441,880
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas														
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	1	780,903,140	0	-	0	-
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	0	6	21,857,985,556	1	383,031,664	1	450,000,000	1	603,282,883	1	700,000,000	1	700,000,000
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	1			2	800,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas														
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sdm agar sesuai standar	9	10	5,484,924,554	3	500,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat	4	10	1,832,070,000	3	500,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	kesehatan dan sdm agar sesuai standar														
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	1	1	197,580,000.	1	824,948,436	1	764,440,653	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana , prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	7	3	608,675,000.	3	589,248,883	4	800,694,503	4	942,629,505	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0			2	353,549,330	2	458,664,392	2	565,577,703	2	746,207,029	2	748,206,008
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	18	7	2,712,778,000	18	824,948,436	18	1,000,000,000	18	1,319,681,306	18	1,500,000,000	18	3,143,314,509
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	179	179	128,310,000	422	235,699,553	422	280,000,000	422	300,000,000	422	350,000,000	422	400,000,000
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	2	2	8,991,366,350	150	4,713,991,064	155	6,115,525,222	160	7,541,036,036	165	9,524,150,192	170	10,066,598,214
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	18	216	187,017,100	218	282,839,464	218	366,931,513	218	452,462,162	218	500,000,000	218	600,000,000
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten kota sesuai standar	Cakupan masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Aktif	95.28	95	66,436,203,960	95	54,374,651,340	95	70,746,434,282	95	87,907,905,713	95	109,508,425,628	98	113,112,043,346
	Percentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
	Percentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi Paripurna	52	0		0		52.33		55.81		58.14		58.14	
	Percentase desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM	50	50		55		60		70		75		80	
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4125	4675	9,889,000	4250	248,057,769	4265	321,808,744	4280	794,220,853	4300	1,452,776,162	4320	1,356,253,501
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4251	4462	3,528,174,000	4255	223,251,992	4260	289,627,870	4265	714,798,768	4270	1,307,498,546	4275	1,220,628,151
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4169	4250	68,604,000	4180	223,251,992	4190	289,627,870	4200	714,798,768	4210	1,307,498,546	4220	1,220,628,151
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23240	24759	15,644,000	23245	223,251,992	23250	289,627,870	23255	714,798,768	23260	1,307,498,546	23265	1,220,628,151
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13635	11616	31,311,000	14000	198,446,215	14250	257,446,995	14500	635,376,683	14750	1,162,220,930	15000	1,085,002,801
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110919	103150	11,498,000	148831	248,057,769	150320	321,808,744	151823	794,220,853	153341	1,452,776,162	154874	1,356,253,501
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19658	20856	27,293,000	19670	173,640,438	19685	225,266,121	19700	555,954,597	19720	1,016,943,314	19750	949,377,451
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9794	13214	9,388,000	18558	198,446,215	18743	257,446,995	5618	635,376,683	19120	1,162,220,930	19311	1,085,002,801
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah penderita diabetes	3871	4362	7,821,000	5507	223,251,992	5563	289,627,870	5618	714,798,768	5674	1,307,498,54	5731	1,220,628,15

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar											6		1
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	557	400	10,775,000.	523	203,407,371	565	263,883,170	595	651,261,100	632	1,191,276,453	632	1,128,300,569
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5414	6414	46,912,000.	5414	347,280,877	5200	450,532,242	5150	1,111,909,195	5100	2,033,886,627	5050	1,898,754,902
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5415	5230	194,600,000	5420	322,475,010	5425	418,351,367	5430	946,331,643	5435	1,888,609,011	5415	1,763,129,552
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	12	20,869,000.	12	153,795,817	12	199,521,421	12	451,327,399	12	900,721,221	12	840,877,171
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3	96,435,000.	3	148,834,661	3	193,085,246	3	436,768,451	3	871,665,697	3	813,752,101
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18	18	48,180,000	18	104,184,263	18	135,159,672	18	305,737,915	18	702,388,423	18	569,626,471
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	65	146,463,000	65	297,669,323	65	386,170,493	65	873,536,901	65	1,743,331,395	65	1,627,504,202
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	20	257,716,000	20	272,863,546	20	353,989,618	20	800,742,160	20	1,598,053,778	20	1,491,878,851
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18	12	8,543,000.	18	99,223,108	18	128,723,498	18	291,178,967	18	581,110,465	18	542,501,401
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52	52	86,632,660	52	223,251,992	52	289,627,870	52	655,152,676	52	1,307,498,546	52	1,220,628,151
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20	7	454,049,000.	20	496,115,538	20	643,617,488	20	1,455,894,836	20	1,905,552,324	20	1,900,000,000
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	12	60,220,348,100.	12	47,130,976,128	12	61,143,661,360	12	65,515,267,599	12	73,583,177,298	12	75,950,196,071
1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0	545	15,927,000.	3311	148,057,769	3344	321,808,744	3377	727,947,418	3410	936,517,897	3444	1,356,253,501
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	1992	252,937,500.	25	124,028,885	25	160,904,372	25	363,973,709	25	421,433,054	25	437,833,036
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11	11	236,234,000.	11	210,000,000	11	270,319,345	11	611,475,831	11	735,831,773	11	681,073,613
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas														
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18			18	148,834,661	18	193,085,246	18	436,768,451	18	500,000,000	18	1,204,641,836
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	2	14,555,000.	10	74,417,331	10	96,542,623	10	218,384,225	12	250,000,000	12	602,320,915
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di	18	18	36,061,300.	18	183,562,749	18	238,138,471	18	538,681,089	18	600,000,000	18	459,436,245

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	88,444,400.	1	173,640,438	1	225,266,121	1	509,563,192	1	550,000,000	1	918,872,491
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5414	450	9,826,000.	5414	198,446,215	5200	257,446,995	5150	582,357,934	5100	606,749,590	5050	976,387,279
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140	150	8,298,000.	150	173,640,438	155	225,266,121	160	509,563,192	165	606,749,590	150	976,387,279
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1000	2000	40,975,000.	1100	257,669,323	1150	386,170,493	1200	873,536,901	1250	900,000,000	1300	976,387,279
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0	4	298,360,100.	5	347,280,877	5	450,532,242	5	1,019,126,385	5	1,716,940,804	5	1,023,945,561
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	14	14	85,176,200.	14	272,863,546	14	353,989,618	14	800,742,160	14	900,000,000	14	976,387,279
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20			21	178,446,215	22	257,446,995	22	582,357,934	24	600,000,000	24	1,084,177,653
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	1	48,264,700.	1	124,028,885	1	160,904,372	1	363,973,709	1	400,000,000	1	976,387,279
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang menjalankan sistem informasi	70	100	15,523,108.	100	88,616,157	100	123,806,260	100	141,760,480	100	150,000,000	100	452,672,818
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	15,523,108.	2	88,616,157	2	123,806,260	2	141,760,480	2	150,000,000	2	452,672,818
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yg dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	100	100	42,398,000.	100	183,432,785	100	220,541,304	100	272,665,132	100	320,000,000	100	798,940,860
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2	2	42,398,000.	12	95,432,785	13	110,000,000	13	152,665,132	14	170,000,000	14	339,504,614
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18			18	88,000,000	18	110,541,304	18	120,000,000	18	150,000,000	18	459,436,246
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya Kualitas dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Percentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	82,41		3,054,264,700.	83	5,294,750,000	84	4,842,850,000	84	5,808,100,000	84	4,865,100,000	84	5,025,000,000
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Percentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP	100		25,334,000.	51.02	2,353,222,222	55.27	2,152,377,778	60.85	2,581,377,778	70.99	2,162,266,667	76.06	2,162,266,667
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	929	800	25,334,000.	500	2,353,222,222	545	2,152,377,778	600	2,581,377,778	700	2,162,266,667	750	2,162,266,667
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Percentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 9 jenis tenaga sesuai standar			2,456,250,000.	72.22	2,059,069,444	72.22	1,883,330,556	72.22	2,258,705,556	72.22	1,891,983,333	72.22	1,891,983,333
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi	325	350	2,456,250,000	134	2,059,069,444	134	1,883,330,556	134	2,258,705,556	134	1,891,983,333	134	1,891,983,333

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan Sesuai Standar	Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)													
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan	Percentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi			572,680,700	1,01	882,458,334		807,141,666		968,016,666		810,850,000	2,53	970,750,000
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6	80	572,680,700	10	882,458,334	13	807,141,666	15	968,016,666	17	810,850,000	25	970,750,000
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Percentase ketersediaan obat esensial	100	100	531,840,000	100	5,007,878,486	100	5,037,828,949	100	5,913,774,672	100	6,811,619,039	100	8,731,909,509
	Percentase produk makanan dan minuman yang terjamin keamanan dan kualitasnya	32	35		37		42		47		53		58	
	Percentase alat kesehatan sesuai standar	58,37	60		60		60		60		60		60	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
Terselenggaranya pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Cakupan pengawasan sarana kefarmasian	100	100	98,720,000.	100	2,225,723,772	100	2,239,035,089	100	2,628,344,299	100	3,027,386,239	100	3,880,848,670
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	78	50	98,720,000.	90	2,225,723,772	100	2,239,035,089	110	2,628,344,299	120	3,027,386,239	130	3,880,848,670
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
Terselenggaranya penerbitan rekomendasi sertifikat produksi PIRT	Cakupan Industri yang memiliki sertifikat PIRT	100	100	220,980,000	100	1,947,508,300	100	1,959,155,702	100	2,299,801,261	100	2,648,962,960	100	3,395,742,587
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140	120	220,980,000	150	1,947,508,300	160	1,959,155,702	180	2,299,801,261	200	2,648,962,960	250	3,395,742,587
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga														
Meningkatnya keamanan pangan produk pangan Industri Rumah Tangga	Percentase sarana PIRT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	100	100	212,140,000	150	834,646,414	100	839,638,158	100	985,629,112	100	1,135,269,840	100	1,455,318,252
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	140	120	212,140,000.	150	834,646,414	160	839,638,158	180	985,629,112	200	1,135,269,840	250	1,455,318,252
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Percentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif	40	40	111,205,000.	50	5,070,000,000	60	5,284,824,894	70	5,150,000,000	75	5,350,000,000	80	250,000,000
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Percentase Posyandu Siklus Hidup		75	111,205,000	75	5,070,000,000	75	5,284,824,894	75	5,150,000,000	75	5,350,000,000	75	250,000,000
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22	22	111,205,000	24	5,070,000,000	24	5,284,824,894	24	5,150,000,000	24	5,350,000,000	24	250,000,000

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 2025-2030 mencanangkan 5 (lima) program, 21 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Diantara 86 sub kegiatan tersebut, terdapat sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dapat diliat pada tabel berikut,

Tabel 4.1 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
-1	-2	-3	-4	-5
	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk Semua			
1	Program Ibu dan Anak Sehat : Pemberian Susu , Vitamin dan Makanan Tambahan Gratis Sejak Janin sampai Umur 2 th	Meningkatnya status gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
2	Rumah Singgah Pasien (Makassar dan Malili)	Meningkatnya akses pasien rujukan terhadap layanan kesehatan lanjutan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
3	Satu Sanitarian 1 Desa	Meningkatnya cakupan layanan kesehatan lingkungan di tingkat desa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
4	Percepatan pembangunan dan pengoperasian Rumah Sakit di Malili dan Towuti	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tingkat lanjutan	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
5	Puskesmas Plus Untuk Daerah – Daerah yang Jauh dan Terpencil	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan emergensi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau	Pengembangan Puskesmas	
6	Penambahan Ambulans Danau dan 1 (Satu) Ambulans 1 (Satu) Desa	Tersedianya ambulans air (danau) yang memadai		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
7	Pemenuhan Sarana, Prasaran, dan Alat Kesehatan Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8	Pemberian Tambahan Insentif untuk Dokter Spesialis, Peningkatan Kesejahteraan, Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu	Meningkatnya kesejahteraan tenaga ASN dan Non ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran, dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada upaya mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat. Antara Renstra Dinas Kesehatan dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja Dinas Kesehatan harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2030, seperti yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Angka kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,.26	
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 kelahiran hidup	13,33	12,83	12,29	11,76	11,24	11,24	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
3	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,40	23,38	22,07	20,76	19,45	19,45	
4	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	190	185	180	175	170	170	
5	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	Rasio	0.057	0.056	0.055	0.055	0.057	0.056	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.01	75.5	76.01	76.5	77.01	77.5	

Tabel 4.1 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STA TUS	SA TU AN	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	posit if	Rasio	0.49	0.6	0.7	0.85	1	1.2	1.4	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	posit if	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	posit if	%	95.73	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	posit if	%	99.84	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	posit if	%	98.12	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	posit if	%	93.86	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	posit if	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STA TUS	SA TU AN	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8	Percentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn) sesuai standar	posit if	%	63.35	100	100	100	100	100	100	
9	Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	posit if	%	97.36	100	100	100	100	100	100	
10	Percentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	posit if	%	78.67	100	100	100	100	100	100	
11	Percentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	posit if	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Percentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	posit if	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Percentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	posit if	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Percentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	posit if	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian visi “**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**”. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berorientasi pada hasil, serta mengacu pada berbagai regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan kesinambungan program pembangunan kesehatan dari periode sebelumnya dan menjawab berbagai tantangan serta isu strategis di bidang kesehatan.

Dengan adanya Renstra ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan, diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, efektif, dan efisien, serta mendorong terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan keselarasan, integrasi, partisipasi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap dinamika yang berkembang.

Adapun kaidah pelaksanaan meliputi:

1. Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional

Seluruh program dan kegiatan harus konsisten dengan RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Kesehatan, RPJMD Kabupaten Luwu Timur, serta regulasi terkait.

2. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Renja tahunan, RKPD, serta KUA-PPAS sehingga setiap program mendapat dukungan alokasi anggaran yang tepat sasaran.

3. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Pelaksanaan Renstra melibatkan peran serta masyarakat, sektor swasta, dan lintas perangkat daerah guna memperkuat sinergi dan keterpaduan dalam pembangunan kesehatan.

4. Berbasis Data dan Bukti (*Evidence-Based Planning*)

Renstra dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta kondisi darurat kesehatan sehingga mampu menyesuaikan prioritas secara adaptif.

5. Fleksibilitas, Responsivitas, Akuntabilitas dan Transparansi

Renstra dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta kondisi darurat kesehatan sehingga mampu menyesuaikan prioritas secara adaptif dan kemudian seluruh proses pelaksanaan dilaporkan secara terbuka dan akuntabel melalui laporan kinerja dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik.

5.2 Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui monitoring secara berkala, supervisi oleh pimpinan, serta pelaporan rutin dari unit pelaksana. Pengendalian ini juga mencakup identifikasi hambatan atau deviasi dalam pelaksanaan, serta pengambilan langkah korektif yang cepat dan tepat, baik melalui perbaikan kegiatan, penyesuaian alokasi sumber daya, maupun peningkatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, juga melibatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen evaluasi capaian program dan kegiatan. Dengan pengendalian yang efektif, diharapkan pelaksanaan Renstra dapat berjalan konsisten dan terukur, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

5.3 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis untuk menilai keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik tahunan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maupun pada akhir periode Renstra sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Evaluasi meliputi aspek input, proses, output, dan outcome dari setiap program dan kegiatan, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut, dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi sarana pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan kesehatan daerah secara terarah, terpadu, serta berkelanjutan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
2. Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
3. Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
4. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
6. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029
7. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029
8. Target Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2025-2029
9. Metadata Indikator-Indikator pada Renstra

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR



TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Indikator Tujuan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,75	74,95	75,15	75,35	75,55	75,55
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,26
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	13,33	12,83	12,29	11,76	11,24	11,24
		Prevalensi Stunting pada Balita	%	20.50	19.2	17.9	16.6	15.3	14
		Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 pddk	190	185	180	175	170	170
		Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	Rasio	0,055	0,055	0,056	0,056	0,057	0,057
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,01	75,50	76,01	76,50	77,01	77,50

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029



PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
<i>Persentase pelayanan kesehatan Ibu hamil sesuai standar</i>	<i>Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi</i>	<i>Persentase ketersediaan obat esensial</i>	<i>Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif</i>
<i>Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar</i>		<i>Persentase alat kesehatan sesuai standar</i>	
<i>Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar</i>		<i>Persentase produk makanan dan minuman yang terjamin keamanan dan kualitasnya</i>	
<i>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</i>			
<i>Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar</i>			

<i>Percentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>
<i>Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>
<i>Percentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar</i>
<i>Percentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar</i>
<i>Percentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sesuai standar</i>
<i>Percentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis(TB) sesuai standar</i>
<i>Percentase orang dengan resiko terinfeksi Human Immunodefisiensi Virus (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/ kota	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/ kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/ Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penerbitan Sertifikat Produksi P-Irt dan Nomor P-Irt sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yg dpt Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
---	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---

CASCADING VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (T1)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota	Persentase memiliki sarana dan sesuai standar	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 (unit)
						Angka Kematian Bayi (AKB)		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		Persentase pemenuhan obat, alkes, dan BHP yang tersedia	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun
						Prevalensi Stunting pada Balita		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun
						Insidensi Tuberkulosis		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun
						Rasio Puskesmas per jumlah penduduk		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar			Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
						Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	
						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	
						Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana , prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	
						Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
						Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) sesuai standar				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	
						Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis (TB) sesuai standar				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi Human Immunodefisiensi Virus (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	
										Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP/ BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
									Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota	Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Aktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
										Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
										Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi Paripurna	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
										Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
												sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
											Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya
											Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan
											Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
											Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
											Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan napza di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (klb) ke laboratorium rujukan/ nasional yang di distribusikan
											Penyelenggaran Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaran kabupaten/ kota sehat
											Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas
											Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
											Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/ kota

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pegelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
											Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
											Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR		
											Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik di fasilitas pelayanan kesehatan		
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji		
											Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang menjalankan sistem informasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan
											Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permohonan rekomendasi teknis Faskes yang terlayani tepat waktu	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya
											Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan		

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/ Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/ Kota	Persentase fasakes dengan jenis tenaga sesuai standar	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)		
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
						Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat esensial	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pengawasan sarana kefarmasian	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
						Persentase alat kesehatan sesuai standar	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri yang memiliki sertifikat PIRT	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri RT		

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
						Persentase produk makanan dan minuman yang terjamin keamanan dan kualitasnya	Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan pengawasan sarana IRTP	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market	
						Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu Siklus Hidup	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai standar	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen administrasi BMD yang dilengkapi/disusun	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
									Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang valid dan terarsip baik	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peaturan Perundang Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
											Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit BMD yang disediakan dan dipelihara	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
											Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan danmesin lainnya yang disediakan
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlahunitsar anadanprasar ana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik yang disediakan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah BMD yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

VISI	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											Dinas Jabatan	
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
											Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2030

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun (%)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,.26
Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	13,33	12,83	12,29	11,76	11,24	11,24
Prevalensi Stunting pada Balita	%	20.50	19.2	17.9	16.6	15.3	14
Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 pddk	190	185	180	175	170	170
Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio	0,055	0,055	0,056	0,056	0,057	0,057

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2023

INDIKATOR	STAT US	SAT UAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	positif	%	0.6	0.7	0.85	1	1.2	1.4
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn) sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100

INDIKATOR	STAT US	SAT UAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100

**TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025-2030**

Indikator	Satu an	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia atau HIV	%	100	100	100	100	100	100

TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)
TAHUN 2025-2030

Kode	Target/ Indikator	Satuan	Target Pencapaian SDGS Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan SDGs 01 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun								
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	81	81	81	81	81	81
Tujuan SDGs 02 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	20,5	19,2	17,9	16,6	15,3	14
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	19,9	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2
2.2.2*	Prevalensi Wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	6,4	6,20	6,0	5,8	5,60	5,40
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	%	9,50	9,00	8,70	8,50	8,20	8,00
Tujuan SDGs 03 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).		119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,26
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga	%	99,40	99,50	99,70	99,80	99,90	100

Kode	Target/ Indikator	Satuan	Target Pencapaian SDGS Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesehatan terlatih.							
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	13,33	12,83	12,29	11,76	11,24	11,24
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	per 100.000 pddk	190	185	180	175	170	170
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.2.(a)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	98	98,6	98,6	98,6	99	99

METADATA INDIKATOR-INDIKATOR PADA RENSTRA

No	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Ket
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	Jumlah ibu hamil yg meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yg sama	X 100.000 IKU
2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	Jumlah bayi usia dibawah satu tahun yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	X 1.000 IKU
3	Prevalensi Stunting pada Balita	%	Jumlah balita pendek dan sangat pendek Jumlah balita yang diukur indeks PB/U atau TB/U	X 100 IKU
4	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 pddk	Jumlah kasus baru dan kambuh TB Jumlah penduduk pada periode tertentu	X 100.000 IKU
5	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio	Jumlah puskesmas Jumlah penduduk pada perioide tertentu	X 30.000 IKU
6	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	Jumlah daya tampung RS Rujukan Jumlah penduduk di kab/ kota	X 1.000 IKK
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten /kota yang terakreditasi	%	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi Jumlah RS di kab/ kota	X 100 IKK
8	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	Jumlah ibu hamil yg mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yg sama	X 100 IKK/ SPM
9	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	Jumlah ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yg sama	x 100 IKK/ SPM

No	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator		Ket
10	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	<p>Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yg mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yg sama</p>	x 100	IKK/ SPM
11	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	<p>Jumlah Balita usia 12-23 bulan yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3</p> <p>Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kab/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yg sama</p>	x 100	IKK/ SPM
12	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p> <p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yg ada di wilayah kerja kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yg sama</p>	x 100	IKK/ SPM
13	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn) sesuai standar	%	<p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yg mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun</p>	x 100	IKK/ SPM
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	<p>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yg mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)</p> <p>Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yg ada di suatu wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama (denominator)</p>	x 100	IKK/ SPM

No	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator		Ket
15	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	<p>Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kab/kota yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yg berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama</p>	x 100	IKK/ SPM
16	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	<p>Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kab/kota yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yg berada di dalam wilayah kerja kab/kota berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama.</p>	x 100%	IKK/ SPM
17	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	<p>Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama</p>	x 100	IKK/ SPM
18	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	<p>Jumlah orang terduga TBC yg dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah perkiraan orang yg terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yg sama.</p>	x 100	IKK/ SPM
19	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	%	<p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yg mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yg sama</p>	x 100	IKK/ SPM

